

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

A. Profil Singkat Lembaga Kementerian

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdiklat Pegawai Kemendikbud semula adalah bagian dari Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada awal 1970an berkembang pemikiran untuk membentuk suatu unit kerja dengan tugas dan fungsi khusus peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1975, dibentuklah unit kerja baru yang diberi nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Pusdiklat Pegawai ditetapkan sebagai organisasi sendiri yang berkedudukan langsung dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak saat itu sampai dengan 1986. Pusdiklat berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 41-42 yang berdekatan dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (sekarang Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah DKI Jakarta) dan Pusat Grafika Indonesia (sebelum pindah ke Srengseng, Jakarta Selatan). Sejak tahun 1986, Pusdiklat Pegawai resmi menempati lokasi yang sekarang dengan alamat Jalan Raya Ciputat-Parung Km.19, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok 16517.

Pusdiklat Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala (eselon II). Sejak berdiri sampai dengan sekarang Pusdiklat telah mengalami 13 (tiga belas) kali. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud terus menata diri, mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja yang semakin kondusif, serta mendesain program-program yang lebih variatif dan inovatif dengan jangkauan sasaran yang lebih luas. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah dan akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kemdikbud dan dengan SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization). Pada tanggal 16-17 Agustus 2004, Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud menjadi tuan rumah Regional Training Center (RETRAC) Governing Board Meeting yang ketujuh. RETRAC merupakan salah satu bagian dari SEAMEO Centers, berlokasi di Vietnam (Ho Chi Minh City). Sejak tahun 1999, Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud adalah anggota dari RETRAC Governing Board. Keanggotaan Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dalam RETRAC Governing Board tidak bersifat *ex officio*.

Pegawai Pusdiklat Pusdiklat sekarang telah berusia lebih dari empat dasawarsa (tepatnya 48 tahun). Dalam usia yang semakin dewasa itu, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah mengalami tiga kali perubahan organisasi. Sekalipun demikian, tugas dan fungsinya relatif tidak berubah, yaitu menyelenggarakan dan mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kemendikbud berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024.

B. Lokasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi

Jl. Raya Ciputat-Parung KM. 19 Bojongsari, Depok, Jawa Barat
16517

C. Visi dan Misi

1) Visi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa

kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

2) Misi

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan secara berkelanjutan berbagai jenis pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkarakter dan berbasis kinerja
- b. Mewujudkan penatakelolaan layanan pelatihan sumber daya manusia aparatur pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang profesional dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digital);
- c. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan organisasi di dalam dan luar negeri; dan
- d. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan ABRI (Aman, Bersih, Rapi, dan Indah).

D. Logo Pusdiklat Kemendikbudristek



Gambar 4.1 Logo Pusdiklat Kemendikbudristek

Lambang ini digunakan sebagai lambang resmi untuk setiap instansi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lambang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia adalah simbol yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia dan instansi di bawah naungannya. Seiring kebijakan yang diberikan, bermunculan lambang-lambang sekolah yang diciptakan dengan masih bernuansa lambang yang resmi. Bahkan, tidak sedikit yang menciptakan lambang yang jauh melenceng dari lambang yang resmi. Simbol dengan semboyan tut wuri handayani yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara sang perintis pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada masa Hindia Belanda. Berikut ini adalah rincian tentang makna yang terkandung dalam lambang yang digunakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia:

1. Bidang segi lima berwarna biru yang tersirat makna kejujuran, ketenangan, kesetiaan, kehandalan, keharmonisan, kesabaran, dan kepekaan.
2. Semboyan tut wuri handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan untuk penghargaan dan penghormatan bagi Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
3. Garuda dengan belencong berapi di dadanya menggambarkan sifat berani, mandiri, dinamis, gagah perkasa, dan penuh semangat mengarungi angkasa luas. Sepasang sayap dan ekor berjumlah lima helai merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara.
4. Buku merupakan kiasan sumber ilmu pengetahuan sebagai kekuatan menjalani kehidupan.
5. Garuda dan buku berwarna putih berarti kesucian, kebersihan, dan keikhlasan. Warna api yang merah berkobar berarti keagungan dan keluhuran pengabdian yang penuh keberanian dan rela berkorban membela kebenaran dan kebaikan.

D. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
Kelas = 15

No.	Rekapitulasi	B	K	+/
1	JPT Pratama	1	1	0
2	Administrator	1	1	0
3	Jabatan Pelaksana	67	101	-34
4	Jabatan Fungsional	27	87	-60
	Jumlah	96	190	-94

KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Kelas = 12

No.	Jabatan	KLS	B	K	+/
1	Analisis Kepegawaian Ahli Muda*	9	1	1	0
2	Arsiparis Ahli Muda*	9	1	1	0
3	Pustakawan Ahli Muda*	9	1	0	1
4	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	0	0	0
5	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
6	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	1	-1
7	Arsiparis Pertama	8	0	1	-1
8	Perancang Diklat	7	8	10	-2
9	Analisis Diklat	7	8	8	0
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	2	3	-1
11	Analisis Tata Laksana	7	2	2	0
12	Bendahara	7	2	2	0
13	Dokter Ahli Pertama	9	0	1	-1
14	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1	1	0
15	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	3	3	0
16	Pengolah Data	6	9	18	-9
17	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	0	2	-2
18	Pengelola Kepegawaian	6	2	2	0
19	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1	2	-1
20	Verifikator Keuangan	6	4	4	0
21	Pengelola Keuangan	6	1	1	0
22	Perawat Pelaksana	6	0	1	-1
23	Perawat Gigi Pelaksana	6	1	1	0
24	Pengelola RMN	6	4	5	-1
25	Pengelola Wisma	6	4	10	-6
26	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
27	Pengadministrasi Pelatihan	5	7	7	0
28	Pengadministrasi Keuangan	5	3	5	-2
29	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	4	-3
30	Pengadministrasi Persuratan	5	3	4	-1
31	PTP Ahli Pertama	8	2	7	-5
32	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	6	-6
33	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	0	5	-6
34	Pranata Komputer Penyelia	8	0	5	-5
35	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	1	4	-3
36	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	5	1	3	-2
37	Pengadministrasi Perpustakaan	5	0	1	-1
38	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	1	-1
39	Widyaiswara Ahli Pertama	8	1	8	-7
	Jumlah	76	142	-67	

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	KLS	B	K	+/
1	Widyaiswara Ahli Utama	13	1	10	-9
2	Widyaiswara Ahli Madya*	12	3	3	0
3	Widyaiswara Ahli Madya	11	9	12	-3
4	Widyaiswara Ahli Muda	9	4	8	-4
5	PTP Ahli Madya	11	0	3	-3
6	PTP Ahli Muda*	9	1	1	0
7	PTP Ahli Muda	9	1	4	-3
8	Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2
9	Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	3	-3
	Jumlah	19	46	-27	

Gambar 4.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.5 Struktur Organisasi

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan data serta fakta yang diperoleh secara langsung, yang disesuaikan dengan teori yang digunakan, dan menjadi pedoman saat melakukan wawancara dengan informan, mengenai Implementasi *Government Public Relations* dalam Membangun Citra Positif. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menjawab tujuan dari hasil penelitian, sebagai berikut

4. Aktivitas *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik untuk membangun citra positif
5. Tindakan *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik untuk membangun citra positif
6. Mekanisme *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik untuk membangun citra positif

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data. Hasil yang didapat berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informan*, informan pendukung, dan informan triangulasi, berikut adalah informan dan jabatannya

1. *Key informan* (Rizqo Yanuananda), menjabat sebagai kepala divisi humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi
2. Informan pendukung (Edy Sofyan), menjabat sebagai *Staff* divisi humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi

3. Informan pendukung (Andri Apriliando), menjabat sebagai ahli pranata komputer Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi
4. Informan triangulasi (Intan Maria L Vierke), menjabat sebagai MSE Politeknik APP Jakarta Kementerian Perindustrian

Pertanyaan penelitian yang telah dirangkai sesuai dengan pokok-pokok yang ada dalam teori penelitian. Data yang diambil bersumber dari wawancara yang telah dilakukan melalui *Key Informan* dan informan pendukung lainnya. Penelitian pada Implementasi *Government Public Relations* dalam membangun citra positif, mengacu pada poin yang terdapat di teori implementasi dan teori *Government Public Relations*. Implementasi *Government Public Relations* yang dilakukan dengan baik mampu membangun citra positif

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, berikut adalah hasil temuan pada implementasi *Government Public Relations* yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam membangun citra positif. Pada pembahasan ini, akan menjelaskan hasil wawancara yang telah dilihat dari lapangan antara lain sebagai berikut:

1. **Aktivitas *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik.**

Dalam penelitian ini menanyakan beberapa pertanyaan terkait aktivitas *Government Public Relations* dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi untuk menganalisa hasil wawancara dengan key informan dan informan I, informan II dan Triangulator.

a. Apa aktivitas yang dilakukan oleh *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“ Misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai salah satu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. Untuk meniadakan tantangan sekaligus menunjang pencapaian amanah, revitalisasi, visi, dan misi dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik, Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan ini disusun dengan memperhatikan aspek prioritas kebutuhan, kepraktisan, dan praktik-praktik terbaik (best practices)”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“Kita sebagai humas itu biasanya melakukan aktivitas berupa membuat press release untuk menyampaikan berita, kebijakan, prestasi yang kita upload melalui website resmi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Kita juga kadang-kadang melakukan konferensi pers, lalu juga membuat konten video, artikel yang menjelaskan kebijakan atau menyampaikan pesan-pesan penting melalui media sosial.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan III menyatakan sebagai berikut :

“Dari yang saya lihat disini aktivitas yang sudah dilakukan oleh humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi adalah penyampaian informasi terkait seperti kebijakan-kebijakan yang ada dipusdiklat dan peraturan-peraturan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tentang pelatihan kepegawaian melalui beberapa media informasi seperti website resmi Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dan media sosial instagram, facebook dan youtube.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut:

“Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh gpr salah satunya Menyampaikan aktivitas dan kinerja apa yang terjadi selama ini dan penambahan wawasan tentang industri seperti peningkatan produk dalam negeri dan penyediaan informasi yang akurat tentang kebijakan pemerintah, mengelola media sosial resmi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, melaksanakan konferensi pers, dan membangun hubungan dengan media massa seperti surat kabar, radio, dan stasiun televisi”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa aktivitas *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik berupa memberikan informasi yang akurat dan aktual tentang kebijakan,peraturan pemerintah dan melakukan konferensi pers serta membuat konten-konten instagram mengenai kebijakan-kebijakan dan pesan-pesan penting melakukan agar dapat membangun citra positif dimata masyarakat.

b. Mengapa Pusdiklat Kemendikbudristek melakukan aktivitas tersebut ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Tujuannya setidaknya untuk mengurangi gap pemahaman masyarakat terkait kebijakan yang sedang diimplementasikan sehingga tingkat misunderstanding antara masyarakat dengan pemerintah bisa jauh berkurang. Selain itu, menyajikan informasi seluas-luasnya bertujuan untuk transparansi terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbudrsitek.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“Tujuannya si untuk mengurangi pemahaman yang biasa terjadi dimasyarakat terkait kebijakan yang sedang di implementasikan, kita juga menyampaikan informasinya dengan jelas dan transparan tentang kebijakan-kebijakan yang ada disini agar masyarakat lebih dapat memahami tentang informasi yang kita berikan”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan III, sebagai berikut :

“aktivitas itu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memberikan informasi terkait berita-berita kebijakan dan peraturan kepada masyarakat karena untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik serta menciptakan hubungan internal dan eksternal menjadi kondusif dan dinamis”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut:

“aktivitas menyebarkan publik, kebijakan, dan peraturan serta mengedukasi publik yang dilakukan humas pemerintahan bertujuan untuk menjaga transparansi yang memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang kebijakan pemerintah dan tujuan-tujuannya, ini dapat membantu mencegah spekulasi atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat. Bertujuan juga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik ke publiknya hai ini membantu menghindari miskonsepsi dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk membentuk pandangan yang rasional. Lalu dengan membuat komunikasi yang terbuka, jujur dan akurat dapat membantu membangun kepercayaan publik karena humas pemerintah itu berperan penting dalam membangun dan memelihara kredibilitas pemerintah di mata publiknya. Secara keseluruhan tujuan dari humas pemerintah melakukan aktivitas tersebut itu untuk mendukung transparansi,partisipasi serta membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa tujuan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi melakukan penyebaran informasi dan mengedukasi publik dalam membangun citra positif yaitu untuk memastikan publik memiliki akses untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan peraturan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan mengurangi pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah terkait kebijakan yang sedang diimplementasikan sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan yang sedang diimplementasikan dan menyajikan informasi seluas-luasnya bertujuan agar masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi.

c. Media apa saja yang digunakan oleh *Government Public Relations* untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Media cetak (majalah inspirasi pusdiklat), website, media sosial (instagram, facebook, YouTube), maupun artikel-artikel dari warta online.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan I, sebagai berikut :

“Kita menggunakan beberapa media media yang paling sering kita gunakan itu website resmi pusdiklat kemendikbud, lalu kita juga menggunakan media sosial juga ada akun youtube,facebook sama instagtam, kita kerap juga memakai berita-berita online”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan II, sebagai berikut

“media yang digunakan dalam penyebaran informasi publik terkait kebijakan peraturan dan mengedukasi publik menggunakan media informasi seperti website kementerian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, media surat kabar online, media sosial berupa akun instagram,facebook dan youtube .”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

“Government Public Relations bisa menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik dalam pembangunan citra positif. Beberapa media yang umum digunakan yaitu seperti : Media Sosial: Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube digunakan oleh GPR untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Laman Web Pemerintah: Laman web resmi pemerintah menyediakan saluran komunikasi yang lebih terpusat dan terorganisir. Media Cetak: GPR dapat menggunakan media cetak seperti surat kabar dan majalah untuk menyebarkan siaran pers, rilis berita, dan artikel-artikel informatif. Media Online: Dalam era digital, media online menjadi sangat penting. GPR menggunakan situs web resmi pemerintah, portal berita, dan situs jejaring sosial untuk menyampaikan informasi terkini, mengedukasi publik, dan berinteraksi dengan masyarakat. “

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi sudah menggunakan media yang sesuai untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik. Media-media yang digunakan bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses berita informasi mengenai kebijakan,peraturan untuk mencari tahu informasi seputar pusdiklat dengan akses yang mudah.

d. Bagaimana tahapan aktivitas yang dilakukan oleh *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Memberikan informasi secara actual melalui media-media yang di gunakan oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“Tahapannya yang pertama kita tahap perencanaan dan penentuan kita merencanakan ingin menyebarkan informasi seperti apa dan juga mengidentifikasi audiens, kedua menentukan media dan saluran komunikasi yang digunakan, ketiga membuat materi informasi yang mudah dimengeti oleh masyarakat, keempat mulai menyebarkan informasinya melalui saluran komunikasi yang telah ditentukan”

Pernyataan dari Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan III, sebagai berikut :

“Tahapannya mencari informasi yang ada dipusdiklat lalu diolah informasi tersebut lalu dikemas menjadi berita yang mudah dipahami oleh publik dan diberikan kemasyarakat melalui media-media seperti website pusdiklat, media sosial dan warta online”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

“Tahapan aktivitas yang dilakukan oleh Government Public Relations (GPR) dalam penyebaran informasi dan mengedukasi publik untuk kegiatan pembangunan citra positif dapat mencakup langkah-langkah berikut: Analisis dan Perencanaan: Tahap awal adalah melakukan analisis mendalam tentang isu-isu yang relevan, persepsi masyarakat, dan kebutuhan komunikasi untuk mencapai tujuan pembangunan citra positif. Penyusunan Pesan dan Materi Informasi: GPR menyusun pesan-pesan yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebijakan atau program pemerintah yang ingin disampaikan. Identifikasi Media dan Saluran Komunikasi: GPR menentukan dan saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau khalayak target. Pemantauan dan Evaluasi: GPR melakukan pemantauan terhadap respon dan reaksi publik terhadap komunikasi yang dilakukan. Dengan pemantauan ini, mereka dapat mengevaluasi keefektifan kampanye komunikasi dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa tahapan aktivitas dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi publik yang dilakukan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi menggunakan tahapan perencanaa dan mengidentifikasi target sasaran, menentukan saluran media komunikasi yang digunakan, membuat materi informasi yang mudah dimengerti oleh publik, dan mulai menyebarkan informasi melalui media-media yang sudah ditetapkan.

2. Tindakan *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi publik, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik

Dalam penelitian ini menanyakan beberapa pertanyaan terkait tindakan *Government Public Relations* dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi untuk menganalisa hasil wawancara dengan key informan dan informan I, informan II dan Triangulator.

a. Apa yang dilakukan *Government Public Relations* dalam menyebarkan informasi kebijakan ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Ada banyak hal, seperti: Penulisan berita pada laman Pusdiklat Pegawai, informasi dan foto-foto kegiatan yang terunggah di media sosial pusdiklat, pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat di sekitar pusdiklat, pelaksanaan sosialisasi internal pusdiklat, live streaming beberapa kegiatan penting di kanal YouTube Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“Banyak ya biasanya seperti penulisan berita tentang informasi yang ada dipusdiklat, kebijakan dan peraturan terus mengupload dokumentasi kegiatan tentang pelatihan dan pesan pesan yang berupa konten foto atau video di media sosial”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan II, sebagai berikut :

“Banyak sih dari yang saya lihat, kaya mengupload foto, video dokumentasi kegiatan yang ada di Pusdiklat terus juga membuat postingan di medsos memperingati hari-hari nasional, juga penulisan berita”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

“GPR memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah untuk membangun citra positif. Beberapa hal yang dilakukan oleh GPR dalam hal ini adalah: Penyediaan Siaran Pers dan Rilis Berita: GPR menggunakan siaran pers dan rilis berita untuk menyampaikan informasi terkini tentang kebijakan atau kegiatan pemerintah. Menyelenggarakan Konferensi Pers: GPR dapat menyelenggarakan konferensi pers untuk memberikan kesempatan kepada media massa dan publik untuk bertanya langsung tentang kebijakan atau kegiatan pemerintah. Mengelola Akun Media Sosial: GPR menggunakan akun media sosial resmi pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Menyusun Materi Informasi: GPR menyusun materi informasi yang komprehensif tentang kebijakan pemerintah atau program kegiatan yang ingin disampaikan kepada publik. Materi informasi ini haruslah akurat, jelas, dan dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa tindakan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam penyebaran informasi dan mengedukasi publik bisa dikatakan cukup baik.

b. Bagaimana bentuk kegiatan *Government Public Relations* dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung contohnya sosialisasi langsung seperti mengadakan seminar mengenai kebijakan yang ingin diterapkan dan sosialisasi tidak langsung itu seperti menggunakan media sosial kami,, tranparan dalam memberikan informasi, tentang kebijakan atau peraturan dan pemaksimalan penggunaan media untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari kami.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan I, sebagai berikut

“Memenuhi permintaan informasi/wawancara oleh media massa, Menyiapkan bahan informasi untuk membuat berita ,mendokumentasikan kegiatan-kegiatan berupa foto atau video untuk diupload dimedia sosial”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan II, sebagai berikut :

“Bentuk kegiatannya ya, dari sepengetahuan saya selama saya jadi pegawai disini itu sering ada literasi digital,sosialisasi langsung maupun tidak langsung, media tour dan konferensi pers”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

“bentuk kegiatan yang umum dilakukan oleh GPR itu bisa seperti: Siaran Pers dan Rilis Berita: GPR menyusun siaran pers dan rilis berita untuk memberitahukan kepada media massa dan publik secara luas tentang kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan atau akan diluncurkan. Kampanye Sosialisasi: melakukan kampanye sosialisasi untuk mengedukasi publik tentang program atau kebijakan pemerintah yang sedang berjalan atau akan diluncurkan. Kampanye ini dapat mencakup iklan di media massa, materi penerangan, infografis, dan video yang menarik. Media Sosial: menggunakan akun media sosial resmi pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah secara lebih luas. Mereka memanfaatkan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk membagikan informasi, foto, dan video terkait. Media Cetak dan Elektronik: GPR memanfaatkan media cetak

seperti surat kabar dan majalah, serta media elektronik seperti radio dan televisi, untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah secara lebih luas kepada masyarakat.

Dalam hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa bentuk kegiatan dalam menyebarkan informasi publik,kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik dengan bentuk memenuhi wawancara dengan media menyiapkan bahan materi informasi untuk diberikan kepada masyarakat lalu membuat konten berupa foto atau video tentang dokumentasi kegiatan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi

c. Mengapa tindakan menyebarkan informasi publik, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik perlu dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Reformasi birokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris. Tujuan model ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang seimbang.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku informan II, sebagai berikut :

“Agar masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang benar terkait dengan kebijakan yang ada dipusdiklat dan menciptakan komunikasi dua arah yang seimbang dengan masyarakat serta membentuk, memelihara, citra dan reputasi positif “

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan III, sebagai berikut :

“Tindakan tersebut dilakukan karena sudah menjadi tugas humas pemerintah agar publik dan masyarakat tahu dan mendapatjan infromasi yan benar terkait kebijakan apa yang ada dipusdiklat ini dalam membangun citra dan reputasi positif Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi”

Dalam hasil wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa tindakan menyebarkan informasi publik, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik dalam membangun citra positif dilakukan karena untuk menciptakan komunikasi dua arah yang seimbang dengan masyarakat dan dapat membangun citra positif Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dimata masyarakat.

d. Siapa pihak yang dilibatkan dalam menyampaikan informasi kebijakan dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“Kehumasan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Humas Kemendikbudristek, Stakeholder, wartawan media, meidia media massa dan media sosial”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“penyampain informasi kebijakan peraturan dan mengedukasi publik terkait melibatkan pihak seperti wartawan media, portal berita online media sosial seperti akun instagram, facebook dan youtube kemudian disampaikan kepada publik,”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan II, sebagai berikut :

“Humas Pusdiklat, wartawan media,portal berita online,masyarakat, dan media sosial resmi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

”dalam menyampaikan informasi publik dan mengedukasi publik bisa melibatkan beberapa pihak seperti masyarakat umum, media sosial, media massa,anggota pemerintahan dengan melibatkan pihak tersebut memungkinkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan informasi kebijakan dan mengedukasi publik”

Dalam hasil wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi tepat dalam melibatkan beberapa pihak agar dapat meningkatkan efektivitas dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik.

3. Mekanisme *Government Public Relations* dalam menyebarkan informasi publik kebijakan,peraturan dan mengedukasi publik untuk membangun citra positif

Dalam penelitian ini menanyakan beberapa pertanyaan terkait mekanisme *Government Public Relations* dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi untuk menganalisa hasil wawancara dengan key informan dan informan I, informan II dan Triangulator.

a. Mekanisme seperti apa yang digunakan oleh *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian

Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“mekanisme yang digunakan menggunakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik meliputi, yaitu kesetaraan, pengawasan, pengakan hukum, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, partisipasi, profesionalisme, akuntabilitas, wawasan ke depan, dan transparansi.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“Mekanisme yang digunakan kita merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, profesionalisme,berwawasan kedepan, efektivitas dan efisiensi”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan II, sebagai berikut :

“mekanisme yang diterapkan merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik meliputi efektifitas, profesionalisme,transparansi, kesetaraan dan partisipasi”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

“disetiap instansi pemerintah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda untuk melakukan aktivitasnya tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dari instansi tersebut. GPR menggunakan berbagai mekanisme untuk penyebaran informasi dan mengedukasi publik. Beberapa mekanisme yang umum digunakan adalah Konferensi Pers, Laman Web Pemerintah, Kolaborasi dengan Media Massa, Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, Media Sosial”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa mekanisme yang digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi publik, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik menggunakan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik meliputi sepuluh prinsip yaitu kesetaraan, pengawasan, pengakan hukum, daya tanggap, efektivitas dan

efisiensi, partisipasi, profesionalisme, akuntabilitas, wawasan ke depan, dan transparansi.

b. Siapa Stakeholder yang dilibatkan dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik ?

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak M. Rizqo Yanuananda Kepala Divisi Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku Key Informan, sebagai berikut:

“ Publik pemangku kepentingan berfungsi sebagai mitra praktisi humas pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kehumasan. Publik pemangku kepentingan humas pemerintah adalah publik yang terdiri dari publik internal primer, publik internal sekunder, publik internal marginal, publik eksternal primer, publik eksternal sekunder, publik eksternal marginal, publik pendukung (proponent), publik penentang (opponent), publik mengambang (uncommitted), publik minoritas vokal (vocal minority), dan publik mayoritas pasif (silent majority). ”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edy Sofyan Staff Humas Pusdiklat Kemendikbud selaku informan II, sebagai berikut :

“publik internal yaitu terdiri dari pimpinan dan karyawan instansi, publik eksternal yaitu pemerintah pusat seperti Kemenpan dan Kemendikbud dan juga media massa berupa media cetak, elektronik, atau online“

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andri Apriliando Ahli Pranata Komputer selaku informan III, sebagai berikut :

“Stakeholder ya kayanya sih yang saya tau itu ada anggota pemerintahan, masyarakat sama mungkin dari LSM”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Maria L Vierke Sebagai Ahli *Government Public Relations* selaku Informan Triangulasi, sebagai berikut :

“ada beberapa stakeholder yang bisa dilibatkan dalam mengimplementasi gpr contohnya bisa masyarakat umum, media massa termasuk surat kabar stasiun televisi dan media online, lalu ada pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tertentu seperti perusahaan swasta dan, lembaga non pemerintah”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisa dalam melibatkan stakeholder tersebut penting untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan informasi kebijakan dan mengedukasi publik seputar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi

4.3 Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi yang beralamat di Jl Bojongsari Depok – Jawa Barat, maka penelitian ini membahas berdasarkan deskriptif hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya pada kutipan wawancara yang didapat selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh pada saat dilakukannya penelitian ini berupa wawancara dengan Key Informan, yaitu Bapak M.Rizqo Yanuananda S.E, M.M sebagai Kepala Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dan informan I Bapak Edy Sofyan S.Sos, M.M. selaku staff Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dan Bapak Andri Apriliando S.Kom sebagai informan II selaku ahli pranata komputer. Data dukungan lainnya diperoleh dari dokumentasi laporan kegiatan yang peneliti peroleh dari Website, serta beberapa data dari akun media sosial sebagai saluran komunikasi yang digunakan dalam menjalankan implementasi kegiatan. Disamping itu, verifikasi keabsahan data juga dilakukan wawancara melalui via Zoom Meeting yang sudah disetujui dengan Ibu Dr. Intan Maria L Vierke dari MSE Politeknik APP Jakarta Kementrian Perindustrian.

Pada penelitian ini berfokus pada implementasi *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam membangun citra positif. Sesuai pada tujuan yang sudah dikemukakan tentang implementasi berpusat pada aktivitas, tindakan dan mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2016). Dalam menjalankan sebuah kegiatan, program pemerintah memerlukan aktivitas, tindakan dan mekanisme yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan dapat berjalan dengan lancar. Tugas *Government Public Relations* atau humas pemerintah menurut (Sam Black 2014).

1. Menyebarkan Informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai.
2. Menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan rakyat sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada dua informan yang merupakan internal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi, maka pembahasan hasil penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas, tindakan dan mekanisme *Government Public Relations* yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam membangun citra positif.

A. Aktivitas *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Dalam Menyampaikan Informasi Publik, Kebijakan, Peraturan Dan Mengedukasi Publik.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam aktivitas menyampaikan informasi dan mengedukasi publik bermula pada pedoman humas pemerintah yaitu membangun citra dan reputasi positif, membentuk opini publik,

menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang dimasyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan sekaligus menunjang pencapaian amanah, revitalisasi, visi dan misi dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik.

Kegiatan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi berupa penyediaan informasi yang akurat dan sosialisasi kepada publik tentang kebijakan pemerintah, mengelola media sosial resmi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, melaksanakan konferensi pers dan membangun hubungan dengan media massa.

Sosialisasi yang dilakukan seperti sosialisasi pencegahan tiga isu kekerasan di lingkungan kerja yang dilakukan melalui media sosial



Gambar 4.3.1 Sosialisasi yang dilakukan Pusdiklat Kemendikbud

(Sumber : @pusdiklat_pegawai)

Hal ini dilakukan untuk mengedukasi publik terkait penyampaian informasi kebijakan, hal ini sudah sesuai dengan yang di kemukakan oleh Effendy (2011) bahwa *Public Relations* adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran, *Public Relations* menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal dan internal”

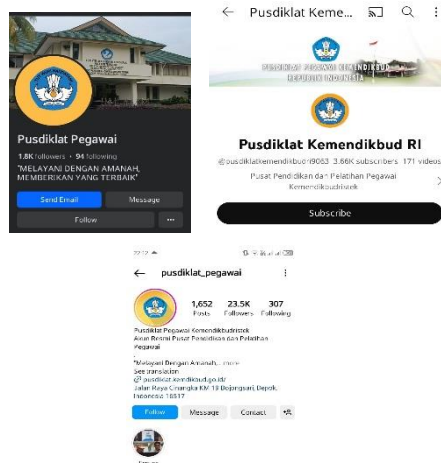


Gambar 4.3.2 Press Conference yang dilakukan Pusdiklat Kemendikbud
(Sumber : Dokumentasi Humas Pusdiklat Kemendikbud)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi melakukan aktivitas *Government Public Relations* dalam penyebaran informasi dan mengedukasi publik bertujuan untuk membangun citra positif serta mengurangi pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah terkait kebijakan sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan yang sedang diimplementasikan. Dan menyajikan informasi seluas-luasnya bertujuan agar masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Dalam penyebaran informasi terkait kebijakan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi semua tertuang secara aktual dan disampaikan melalui media online seperti website resmi (Instagram, Facebook, Youtube) dan media cetak seperti majalah pusdiklat. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam aktivitas *Government Public Relations* untuk menunjang fungsi dari *GPR* dalam pengumpulan data dan penerangan informasi serta publikasi hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Widjaja dalam bukunya *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (2002) bahwa ruang lingkup humas meliputi pengumpulan data, penerangan dan publikasi.

Media yang digunakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi kebijakan, peraturan dan perundang-undangan dalam mengedukasi publik dilakukan melalui secara langsung dengan pertemuan, diskusi, rapat, dan tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan media sosial resmi seperti

website Kemdikbud.go.id, Instagram (Pusdiklat_Pegawai), Facebook (Pusdiklat Pegawai), Youtube (@pusdiklatkemendikbudri9063) dan media surat kabar (online dan konvensional).



Gambar 4.3.3 Media Sosial Resmi yang digunakan Pusdiklat Kemendikbudristek

(Sumber : Pusdiklat_Pegawai, Pusdiklat Pegawai, Youtube @pusdiklatkemendikbudri9063)

Humas Pusdiklat Kemendikbudristek menggunakan berbagai media tersebut untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, kebijakan dan peraturan yang ada di Pusdiklat Kemendikbudristek. Dalam penyampaian informasi kebijakan dan mengedukasi publik dilakukan dengan sesuai dengan aturan perundangan yang mendasari tujuan kegiatan pembangunan citra positif. Aktivitas penyebaran informasi yang dilakukan oleh *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi menggunakan banyak media informasi. Maka, penyebaran informasi terkait kegiatan atau kebijakan dapat diakses dengan mudah sehingga masyarakat dapat menjangkau informasi tentang Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.

Tahapan aktivitas yang digunakan dalam penyebaran informasi kebijakan dan mengedukasi publik adalah :

- a. Perencanaan dan menganalisis mendalam tentang isu-isu yang relevan, persepsi masyarakat dan kebutuhan komunikasi untuk mencapai tujuan pembangunan citra positif
- b. Penyusunan pesan dan materi yang jelas, konsisten dan sesuai dengan kebijakan atau program pemerintah yang ingin disampaikan
- c. Mengidentifikasi media dan menentukan saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau khalayak target.
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap reaksi publik terhadap komunikasi yang dilakukan. Dengan ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dapat mengevaluasi keefektifan penyebaran informasi kebijakan dan dapat melakukan perbaikan jika dibutuhkan

B. Tindakan *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Dalam Menyebarkan Informasi Publik, Kebijakan, Peraturan Dan Mengedukasi Publik

Tindakan merupakan kegiatan atau kumpulan aksi yang memiliki rencana guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi merujuk pada tugas *Government Public Relations* seperti menyebarkan informasi mengenai kebijakan, peraturan, perundangan dan mengedukasi publik. Hal ini sudah sesuai dengan yang telah dikemukakan Sam Black dalam bukunya *Practical Public Relations* tugas humas pemerintah 1) menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai ,2) menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan rakyat sehari-hari.

Dalam hasil wawancara menjelaskan tindakan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan

Teknologi dalam kegiatan menyampaikan informasi dan mengedukasi publik dengan memberikan penulisan berita melalui website resmi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi yang berisi informasi, kebijakan dan peraturan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan internal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, mengupload foto-foto di media sosial memuat kegiatan-kegiatan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

KOMITMEN PUSDIKLAT PEGAWAI MEMBERIKAN KONTRIBUSI UNTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

06/22/23 | [Berita 06/22/23 dan PHL IV Dilaks Teknis Fungsional seker](#)



Sawangan, Pusdiklat-Pusdiklat Pegawai terus melaksanakan pelatihan bagi ASN Kemendikbudristek maupun kementerian/lembaga (K/L) lain secara marathon selama bulan Agustus 2023. Pada tanggal 21 Agustus 2023 mulai dilaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 7, 8, dan 9 kerja sama Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta Pelatihan Teknis Dasar-dasar Kearsipan Angkatan 5 dan 6 ketiga pelatihan tersebut bertempat di Pusdiklat Pegawai. Sedangkan Pelatihan Teknis Advokasi dan Komunikasi Stakeholder Pendidikan bagi Widyaprada Angkatan 4, 5, dan 6, Pelatihan Teknis Penjaminan Mutu Pendidikan bagi Widyaprada Angkatan 7, 8, dan 9 serta Pelatihan Penguasaan Jajaran Fungsional Analisis SDM Aparatur Angkatan 3 dan 4 bertempat di BBPMP Provinsi Jawa Timur. Adapun acara pembukaan pelatihan-pelatihan tersebut berlangsung secara hybrid berpusat di Gedung Merah Putih, Pusdiklat Pegawai dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusdiklat Pegawai, Dr. Ir. Mustangimah, M.Si dengan didampingi oleh Ketua Tim Pelatihan Kepemimpinan, PPPK dan Soskul, Pusdiklat Pegawai, Akhmad HASI, M. Pd. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sulamatul Himmah mewakili BKPSDM Kabupaten Tangerang dan Nyoman Yurisman dari Kemenkumham, Hadir di BBPMP Propinsi Jatim, Sujarno, M.Pd dan Ketua Tim Pelatihan Teknis dan Fungsional, Jarni, M.Pd.

Gambar 4.3.4 Berita dan Informasi yang tertuang secara aktual di Website Resmi Pusdiklat Kemendikbudristek

(Sumber : Pusdiklat.Kemdikbud.go.id)

Tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pemahaman masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek dan masyarakat lebih mengerti tentang implementasi yang sedang dijalankan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek.

Aktivitas ini merupakan peranan *Government Public Relations* dalam melakukan fungsi manajemen sesuai dengan telah dikemukakan oleh Ruslan (2010) aktivitas utamanya berperan sebagai berikut :

a) *Communicator*

kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung

b) *Back Up Management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain mencapai tujuan bersama

c) *Good Image Maker*

Menciptakan publikasi yang positif.

Bentuk kegiatan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyampaikan informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik dengan memberikan informasi baik dalam bentuk berita, narasi, foto dan video melalui beberapa media informasi seperti media sosial dan warta online dan Memenuhi permintaan informasi/wawancara oleh media massa, Menyiapkan bahan informasi untuk membuat berita, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan berupa foto atau video untuk diupload di media sosial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi juga melibatkan beberapa stakeholder seperti masyarakat umum, media massa, dan anggota pemerintahan.



Gambar 4 3.5 Dokumentasi kegiatan pelatihan administrator bagi para CPNS

(Sumber : Dokumentasi Pusdiklat Kemendikbudristek)

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek agar masyarakat mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan diharapkan memperoleh citra positif di mata masyarakat.

C. Mekanisme *Government Public Relations* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Dalam Menyebarkan Informasi Publik, Kebijakan, Peraturan Dan Mengedukasi Publik

Berdasarkan hasil wawancara internal dengan Kepala Humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik pada kegiatan membangun citra positif menggunakan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik meliputi prinsip yang diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik bagi humas memiliki beberapa manfaat penting. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu kerangka kerja yang memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. ketika prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dalam fungsi *Government Public Relations* dapat menghasilkan beberapa manfaat diantara lain :

- a. Transparansi dan akuntabilitas : pedoman tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong humas pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan peraturan serta mengedukasi publik secara transparan dan akuntabel dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat
- b. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat : humas pemerintahan dapat menjembatani komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas : dengan memiliki pedoman yang mengatur cara humas pemerintah beroperasi, proses

komunikasi dan koordinasi internal dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja humas dalam menyampaikan informasi kebijakan dan peraturan serta mengedukasi publiknya